

NAMA : NASYWA MUTHI AZMI

NPM : 2413053205

KELAS : 2F

1. Bagaimakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?

Jawab :

Berita ini menyoroti konflik antara hak demokrasi dan kesehatan masyarakat . Siswa dan masyarakat ingin menyampaikan aspirasi mereka, tetapi pertemuan besar selama pandemi meningkatkan risiko penyebaran Covid-19. Ada pula ketidaksesuaian informasi antara Kementerian Pendidikan dan Satgas Covid-19, yang menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi.

Hal positif yang dapat diambil adalah meningkatnya kesadaran politik di kalangan siswa, meluasnya diskusi publik mengenai UU Cipta Kerja, dan pelajaran bagi pemerintah tentang menjadikan komunikasi kebijakan lebih transparan dan inklusif. Penting untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi tanpa membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Bagaimakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?

Jawab :

Mengemukakan pendapat di tempat umum adalah hak demokratis yang dijamin oleh undang-undang. Namun, hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Jika demonstrasi dilakukan dengan cara merusak fasilitas umum, tindakan itu bukan lagi bentuk aspirasi yang sehat, melainkan tindakan destruktif yang justru merugikan masyarakat sendiri. Fasilitas umum dibangun untuk kepentingan bersama, dan merusaknya hanya akan menambah masalah tanpa benar-benar menyelesaikan inti permasalahan yang diperjuangkan. Jika seseorang merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak, ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang. Demonstrasi yang baik adalah yang tetap menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain, termasuk menjaga fasilitas umum agar tidak rusak.

Cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19 yaitu dengan cara :

1. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik
 2. Membuat petisi online yang bisa mendapatkan dukungan luas tanpa perlu turun ke jalan
 3. Mengajukan pertemuan resmi dengan pemerintah, DPR, atau lembaga terkait untuk menyampaikan masukan secara langsung.
 4. Mengadakan aksi simbolis atau konferensi pers daring yang bisa menjangkau banyak orang tanpa harus berkerumun.
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

Jawab :

Benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh sering terjadi karena perbedaan tujuan. Pengusaha ingin efisiensi dan keuntungan, sementara buruh menginginkan kesejahteraan dan perlindungan kerja. Solusi yang menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak dapat dilakukan melalui :

1. Membuka ruang negosiasi antara pengusaha, buruh, dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang adil.
 2. Meningkatkan transparansi kebijakan perusahaan terhadap pekerja.
 3. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang melindungi hak buruh tanpa menghambat iklim investasi.
 4. Pengusaha dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dengan insentif berbasis produktivitas. Buruh juga memiliki kewajiban meningkatkan keterampilan agar tetap kompetitif.
 5. Menerapkan sistem kerja yang fleksibel tanpa mengorbankan hak-hak dasar buruh.
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Jawab :

Untuk mewujudkan kehidupan harmonis antara negara dan warga negara, beberapa hal perlu diperbaiki agar hak dan kewajiban seimbang. Pemerintahan harus transparan dan akuntabel dengan menjalankan kebijakan yang adil serta menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Pendidikan kewarganegaraan juga harus diperkuat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi dalam demokrasi. Selain itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga, di mana negara menjamin kesejahteraan rakyat melalui layanan publik yang berkualitas, sementara warga negara berkontribusi dengan membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga ketertiban. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial juga perlu dilakukan

dengan pemerataan ekonomi serta akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan perbaikan ini, hubungan negara dan warga negara menjadi lebih seimbang, menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis.